

Ringkasan Kebijakan No. 22

Mengoptimalkan Program Bantuan Benih Jagung untuk Meningkatkan Produktivitas di Indonesia

oleh Aditya Alta, Azizah Fauzi, Binar Asri Lestari, Biyan Shandy, Deasy Pane, Hasran, Maria Dominika, dan Shabrina Tjandra



Pesan-Pesan Utama

- Jagung berperan penting terhadap perekonomian karena komoditas ini digunakan sebagai bahan baku dan barang setengah jadi oleh sektor-sektor hilir, seperti pakan ternak (62,72%) dan tepung olahan (11,40%). Jagung juga merupakan sektor pertanian dengan nilai tambah tertinggi ketiga setelah padi dan kelapa sawit.
- Dibandingkan dengan periode 2014–2019, tingkat pertumbuhan produktivitas jagung dalam lima tahun terakhir terpantau melambat. Oleh karenanya, momentum produktivitas jagung harus dipertahankan dan ditingkatkan. Salah satu upaya kebijakan yang dapat dilakukan adalah meningkatkan adopsi benih unggul melalui program bantuan benih. Namun, Survei Ubinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa produktivitas petani yang menerima bantuan benih justru lebih rendah daripada yang tidak. Data menunjukkan bahwa produktivitas penerima bantuan benih menurun antara 2019 dan 2022. Hal ini memperlihatkan adanya urgensi untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program bantuan benih.
- Penargetan penerima bantuan yang lebih baik menggunakan *dataset* untuk menentukan status pasar telah membuahkan hasil yang positif: (i) meningkatnya jumlah petani yang mengadopsi varietas benih unggul secara mandiri setelah berhenti menerima bantuan dan (ii) berkurangnya distorsi pasar. Namun, jumlah penerima bantuan yang kurang tepat sasaran masih besar, dan rasio biaya-manfaat program secara keseluruhan tidak secara signifikan lebih baik.
- Untuk menunjang pertumbuhan produktivitas jagung, perbaikan program bantuan benih harus dilakukan secara komprehensif. Artinya, upaya perbaikan seyogianya dilakukan lebih dari sekadar memperluas penerapan klasifikasi wilayah berdasarkan status pasar. Upaya yang dikerahkan perlu mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hal ini meliputi perencanaan strategis secara terintegrasi, tujuan program yang jelas, pemantauan atas adopsi benih, penargetan yang akurat, penyesuaian dengan pendampingan praktik pertanian yang baik (*good agricultural practices* atau GAP), dan dukungan infrastruktur.



Mengevaluasi Program Bantuan Benih untuk Meningkatkan Produktivitas

Jagung adalah salah satu komoditas pertanian yang paling utama di Indonesia jika dilihat dari pertumbuhan produktivitas serta kontribusi ekonominya terhadap sektor-sektor lain dalam rantai nilai jagung. Produk-produk jagung digunakan secara luas baik sebagai bahan baku maupun barang setengah jadi oleh sektor-sektor hilir, seperti pakan ternak (62,72%) dan tepung olahan (11,40%). Selain itu, jagung memiliki nilai tambah tertinggi ketiga setelah padi dan kelapa sawit. Dibandingkan dengan beras dan kedelai, jagung mencatatkan pertumbuhan produktivitas tahunan tertinggi (Kementerian Pertanian [Kementan], 2023). Keberhasilan adopsi benih jagung unggul (sekitar 84% dari rumah tangga petani pada 2022) menjadi faktor penting di balik tingginya produktivitas jagung (BPS, 2023). Kendati demikian, tingkat pertumbuhan produktivitas jagung dalam lima tahun terakhir tampak melambat dibandingkan dengan periode 2014–2019. Peningkatan adopsi benih unggul dapat menjadi kunci untuk terus meningkatkan produktivitas jagung.

Bantuan benih adalah salah satu opsi kebijakan yang dapat dilakukan untuk menggiatkan adopsi benih unggul. Namun, efektivitas dan efisiensinya harus diperbaiki. Saat ini, sebagian besar program bantuan benih jagung didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan umumnya menggunakan mekanisme penyaluran berbentuk hibah barang. Penerima bantuan dipilih berdasarkan kriteria umum yang lebih menekankan terkait luas lahan dan keanggotaan dalam kelompok tani. Akan tetapi, terdapat sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan program bantuan benih. Beberapa di antaranya adalah ketidaksesuaian benih dengan preferensi penerima bantuan, pengumuman yang mendadak, serta waktu yang terlalu singkat, khususnya pada program-program yang dananya bersumber dari APBN. Sementara itu, benih yang berasal dari produsen dengan lisensi dari badan riset pemerintah mengalami kendala. Kendala tersebut meliputi kesulitan produsen dalam memperoleh benih sumber (*parent seeds*)¹ secara konsisten sesuai dengan kebutuhan dan kurangnya orientasi komersial. Survei Ubinan dari BPS juga mengungkap bahwa produktivitas petani penerima bantuan benih justru lebih rendah daripada yang tidak. Data menunjukkan bahwa produktivitas penerima bantuan menurun antara 2019 dan 2022 (BPS, 2023).

Guna memperbaiki penyaluran bantuan benih dan meningkatkan dampaknya, sejumlah pemerintah daerah telah mengadopsi mekanisme “program bantuan cerdas (*smart subsidy*)”. Upaya ini dilakukan dengan menentukan status pasar di suatu daerah tertentu berdasarkan *dataset*.² Dengan demikian, penargetan program bantuan benih dapat dilakukan dengan mekanisme yang paling efektif untuk pasar berstatus kuat dan semikuat. Sementara itu, pasar dengan status lemah dapat dipertimbangkan sebagai sasaran hanya jika terdapat potensi untuk berkembang. Mekanisme penetapan target penerima secara konvensional maupun *smart subsidy* perlu dievaluasi untuk menilai efektivitasnya serta mengetahui apakah penerapan *smart subsidy* akan menghasilkan dampak yang sepadan.

¹ Saat ini, produksi benih hibrida induk mengalami kendala akibat belum jelasnya regulasi mengenai royalti. Kendala ini muncul setelah adanya peralihan institusi penelitian pemerintah, termasuk para pemulia benih yang tanaman terafiliasi dengan lembaga pemerintah seperti Balai Penelitian Tanaman Serealia (Balitserealia) Maros, ke BRIN pada 2022.

² *Dataset smart subsidy* digunakan untuk menentukan tiga status pasar (lemah, semikuat, dan kuat) di suatu daerah tertentu (tingkat kecamatan atau desa). Indikator dalam *dataset* tersebut mencakup luas panen, produktivitas, aktivitas pemasaran oleh perusahaan benih, serta akses ke kios dan pedagang lokal.

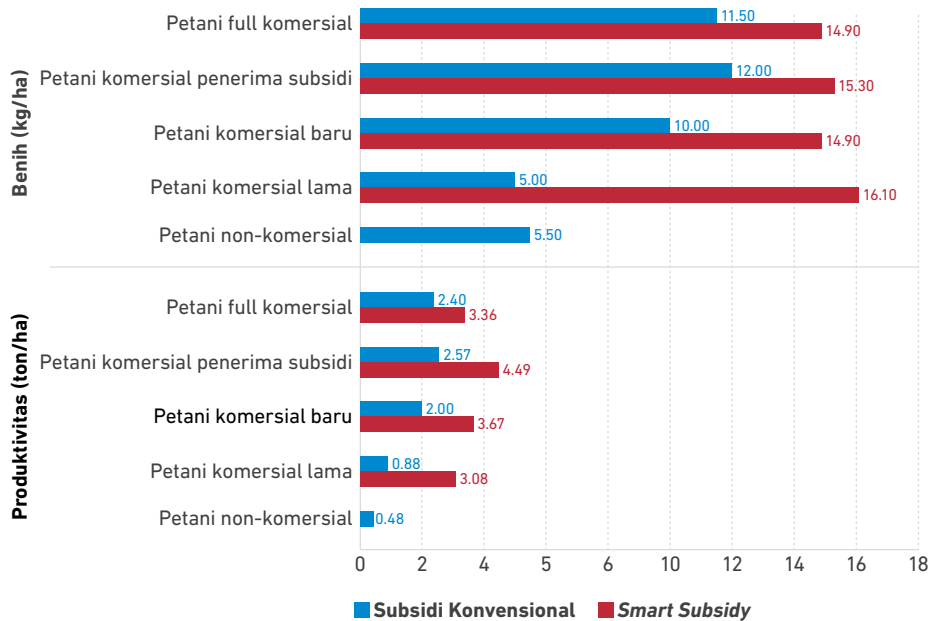
Pelajaran yang Dapat Dipetik dari Penerapan *Smart Subsidy*

Menggunakan survei analisis biaya-manfaat (ABM) dan wawancara mendalam di daerah-daerah yang menerapkan target penerima berdasarkan *smart subsidy* dan secara konvensional,³ studi ini menggali efektivitas dan efisiensi program bantuan benih. Secara umum, berikut adalah temuan-temuan yang dihasilkan.

1. Di daerah-daerah yang menerapkan *smart subsidy* maupun skema konvensional, 61–88% penerima bantuan merupakan petani yang mampu membeli benih secara mandiri. Fakta ini mengindikasikan bahwa penyaluran bantuan masih tidak tepat sasaran. Sementara itu, sekitar 39% penerima bantuan di daerah *smart subsidy* adalah petani komersial yang sepenuhnya bergantung kepada bantuan dalam dua tahun terakhir. Hal tersebut memperlihatkan bahwa proses penentuan penerima bantuan yang lebih tepat sasaran sudah dilakukan di daerah *smart subsidy*. Namun, pelaksanaannya masih perlu diperbaiki guna mengurangi penyaluran yang tidak tepat sasaran dan mencegah kebergantungan petani terhadap bantuan.
2. Dalam lima tahun terakhir, jumlah petani yang beralih dari penerima bantuan menjadi petani yang mengadopsi benih secara mandiri (petani komersial baru) mencapai 24% di daerah *smart subsidy*, sementara di daerah dengan skema konvensional hanya 3%. Peningkatan tertinggi dalam proyeksi rasio biaya-manfaat (*benefit-cost ratio* atau BCR) untuk lima tahun mendatang juga ditunjukkan oleh petani dengan pola penggunaan benih seperti ini (petani komersial baru/*graduate*) – walaupun produktivitasnya masih dapat ditingkatkan lebih lanjut. Sementara itu, sekitar 8% penerima bantuan di daerah yang menerapkan pola penargetan secara konvensional terus bergantung kepada bantuan dan tidak beralih menggunakan benih jagung hibrida komersial. Kelompok ini menunjukkan produktivitas terendah dan rentan kembali menggunakan benih jagung lokal. Di daerah *smart subsidy*, hal ini tidak terjadi.
3. Di angka 15,3 kg/ha, penggunaan benih relatif lebih sesuai dengan rekomendasi pada seluruh tipe petani di daerah *smart subsidy* daripada di daerah yang menentukan target penerima secara konvensional (**Gambar 1**). Penggunaan benih tersebut menghasilkan rata-rata produktivitas yang lebih baik di daerah *smart subsidy*, yakni 3,71 ton/ha. Sementara itu, rata-rata produktivitas di daerah yang menentukan target penerima bantuan secara konvensional adalah 2,38 ton/ha.

³ Studi ini dilakukan di dua kabupaten yang berdekatan dengan kondisi agroklimat yang serupa. Keduanya beralih dari praktik budi daya jagung tradisional menggunakan benih lokal ke praktik pertanian yang baik menggunakan varietas benih unggul. Dua kabupaten tersebut dipilih untuk mengevaluasi dampak bantuan terhadap perilaku mengadopsi benih secara mandiri setelah program berakhir dan rantai pasok jagung. Studi berfokus pada rantai pasok jagung selama musim hujan 2023 dan untuk melacak kebiasaan pemilihan benih petani selama lima tahun terakhir.

Gambar 1.
Rata-Rata Produktivitas dan Penggunaan Benih Jagung di Daerah *Smart Subsidy* dan Bantuan Konvensional



Catatan: (1) **Petani full komersial**: Membeli benih hibrida secara mandiri dan tidak pernah menerima bantuan benih dalam lima tahun terakhir. (2) **Petani komersial penerima bantuan (leak)**: Melakukan pembelian benih hibrida secara mandiri dan tetap membeli walaupun menerima bantuan (3) **Petani komersial baru (graduate)**: Menerima bantuan benih hibrida sebelum tahun 2022, setelahnya membeli benih hibrida secara mandiri (4) **Petani komersial lama (dropping out)**: Membeli benih hibrida secara mandiri sebelum tahun 2022, dan sejak 2022 hanya menanam jika menerima bantuan (5) **Petani nonkomersial**: Tidak pernah membeli benih hibrida dalam 5 tahun terakhir, menggunakan benih lokal dan hanya menanam benih hibrida jika menerima bantuan.

- Distorsi pasar di level kabupaten – yang ditandai dengan persentase pembeli benih hibrida yang menerima bantuan benih – lebih tinggi di daerah dengan skema konvensional (21%) daripada di daerah *smart subsidy* (6%). Ditemukan juga bahwa skema konvensional lebih banyak mengedarkan benih yang serupa dengan merek-merek yang dijual secara komersial. Hal ini dapat berdampak negatif dengan mengurangi pembelian benih secara mandiri di daerah-daerah yang pasar benihnya sudah berkembang. Selain itu, petani penerima bantuan sering kali memperoleh merek yang memiliki potensi panen lebih rendah atau kurang sesuai dengan karakteristik lahan mereka. Akibatnya, pembelian benih secara mandiri menurun dikarenakan hasil panen yang lebih sedikit daripada yang diharapkan.
- Peningkatan rasio manfaat dibandingkan biaya (*Benefit Cost Ratio/BCR*) antara skenario bantuan dan tanpa bantuan di kedua daerah sangat kecil (0,03 dan 0,06, secara berturut-turut). Temuan ini memiliki dua implikasi. Pertama, jika bantuan hanya mengurangi biaya petani, manfaat secara keseluruhan hanya sedikit lebih baik pada skenario bantuan. Kedua, untuk meningkatkan BCR, program bantuan benih harus berdampak terhadap peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, program bantuan benih seharusnya bertujuan menambah jumlah petani komersial baru dan meningkatkan produktivitas mereka, sembari mencegah petani komersial bergantung kepada bantuan benih. Hal ini dapat diwujudkan melalui pendampingan budidaya pertanian yang baik (*Good Agriculture Practices/GAP*), upaya untuk mengurangi penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, serta mekanisme distribusi yang bersifat non-distortif terhadap pasar, seperti bantuan tunai.

Pencapaian dan Tantangan dalam Penerapan *Smart Subsidy*

Penerapan *smart subsidy* telah didukung oleh sejumlah perbaikan. Mekanismenya ditunjang oleh dasar hukum yang kuat (surat keputusan) yang terdiri atas petunjuk teknis (juknis) pada tingkat provinsi dan petunjuk pelaksanaan (juklak) pada tingkat kabupaten. Di samping itu, *smart subsidy* menyediakan *dataset* dan instrumen untuk mengidentifikasi status pasar dengan mempertimbangkan tingkat adopsi benih unggul, potensi budi daya jagung, dan keberadaan pelaku pasar jagung di masing-masing daerah. *Smart subsidy* juga memiliki mekanisme distribusi yang fleksibel berdasarkan status pasar untuk setiap daerah. Alih-alih menggunakan satu mekanisme untuk semua status pasar, *smart subsidy* dapat menyesuaikan bentuk penyaluran berdasarkan status pasar: bantuan berbentuk hibah barang untuk status pasar lemah yang memiliki potensi untuk berkembang, subsidi harga atau bantuan berbentuk hibah barang untuk status pasar semikuat, dan bantuan uang untuk status pasar kuat.

Terlepas dari segala keunggulannya, masih ada aspek-aspek yang dapat diperbaiki dari persiapan dan pelaksanaan *smart subsidy*. Sejumlah pemerintah daerah mengaku bahwa pengumpulan *dataset* (dan pembaruannya secara rutin) serta instrumen pasar jagung memakan waktu. Kendala tersebut menunda kesiapan data dalam pelaksanaan program *smart subsidy*⁴. Terkait mekanisme distribusi bantuan, pemegang anggaran lebih menyukai penyaluran bantuan berbentuk hibah barang karena sifatnya yang lebih praktis. Sementara itu, subsidi harga dipandang paling kompleks karena melibatkan distribusi benih di kios dan proses penggantian biaya kepada para penyedia benih yang berpartisipasi.

Pelajaran yang Dapat Dipetik dari Pengalaman Negara-Negara Lain

Beberapa negara Afrika Sub-Sahara—Malawi, Zambia, Tanzania, dan Nigeria—telah menerapkan program-program bantuan benih jagung serupa dengan aspek-aspek penting yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia. Berbagai aspek tersebut memungkinkan program berjalan secara lebih efisien, meminimalkan tindak korupsi, serta menghasilkan dampak yang lebih baik terhadap adopsi benih unggul dan produktivitas (Kato & Greeley, 2016). Hal tersebut meliputi:

- **Tujuan yang jelas dan spesifik.** Program bantuan benih jagung di negara-negara tersebut berfokus pada tujuan-tujuan yang jelas dan spesifik. Sebagai contoh, Nigeria menargetkan pengembangan sektor input swasta, sementara Malawi dan Tanzania memprioritaskan rumah tangga petani dengan kepala keluarga perempuan.
- **Bantuan tunai menggunakan voucher fisik atau elektronik.** Di Zambia dan Nigeria, bantuan ditebus menggunakan voucher fisik atau bahkan voucher elektronik (*e-voucher*) pada ponsel yang dapat digunakan petani untuk mendapatkan benih dari pasar sesuai kebutuhan. Dengan menghindari penyaluran bantuan berbentuk hibah barang, program-program ini memangkas jumlah pihak perantara.
- **Partisipasi sektor swasta.** Penerima bantuan dapat menebus voucher untuk merek benih sesuai keinginan mereka sehingga mengurangi distorsi pasar. Di Zambia dan Tanzania, hanya beberapa perusahaan yang ditunjuk yang dapat berpartisipasi dalam program. Di Nigeria, semua perusahaan dapat berpartisipasi secara terbuka.
- **Exit strategy.** Tanzania merotasi penerima bantuan setiap tiga tahun dan mengakhiri program setelah enam tahun. Zambia secara bertahap mengurangi jumlah subsidi untuk penerimanya.

⁴ Ketika studi dilakukan, pengumpulan dataset masih berlangsung dan baru rampung pada Agustus 2024.

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Dari pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa penerapan smart subsidy berkorelasi dengan produktivitas yang lebih baik secara keseluruhan, penggunaan benih secara lebih optimal, dan peluang komersialisasi yang lebih baik dengan lahirnya petani-petani komersial baru. Di saat yang bersamaan, smart subsidy bukan tanpa kekurangan, seperti masih adanya penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran dan peningkatan BCR yang tidak signifikan. Untuk menyokong pertumbuhan produktivitas jagung, program bantuan benih perlu direformasi secara komprehensif. Reformasi ini harus lebih dari sekadar memperbaiki penargetan dan penetapan kriteria sebagaimana yang telah dilakukan oleh praktik smart subsidy saat ini. Berikut adalah sejumlah rekomendasi untuk mereformasi program bantuan benih.

A. Perencanaan

Rancangan induk (grand design)

- A1.** Menyusun rencana strategis yang terintegrasi secara nasional untuk semua program bantuan benih. Pemerintah Pusat harus memiliki rancangan induk pengembangan jagung jangka menengah untuk memenuhi permintaan pakan dan pangan. Dengan adanya dokumen ini, pemerintah akan memiliki arah strategis untuk mengembangkan sektor jagung. Dalam konteks bantuan benih, rancangan induk tersebut perlu mencakup identifikasi fokus daerah (provinsi atau kabupaten) dan tujuan-tujuan utama pemberian bantuan (contoh: pengembangan sentra jagung baru, peningkatan produktivitas sentra yang sudah ada, atau meningkatkan nilai tukar petani [NTP]).
- A2.** Menyelaraskan program bantuan benih dengan dukungan infrastruktur, seperti irigasi dan fasilitas pasca-panen, untuk mewujudkan rancangan induk. Pada tingkat nasional, upaya ini memerlukan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang pedoman umum bantuan pemerintah sebagai landasan juknis/petunjuk operasional (jukops) dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- A3.** Memperluas implementasi klasifikasi wilayah berdasarkan status pasar secara nasional menggunakan data yang tersedia dari dinas pertanian kabupaten dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan. Perluasan implementasi secara nasional melibatkan upaya untuk memprioritaskan provinsi dan kabupaten berdasarkan rancangan induk dan menormalisasi data yang diperbarui.⁵

Pedoman – Rekomendasi-rekomendasi berikut mencakup tambahan/modifikasi terhadap pedoman dari pemegang anggaran (APBN, APBD), yang akan menjadi dasar pelaksanaan pada tingkat kabupaten:

- A4.** Menetapkan tujuan program dan indikator capaian yang jelas dan spesifik (contoh: peningkatan produktivitas, pengenalan varietas cerdas iklim [*climate-smart*], atau pengurangan biaya). Tujuan program dan indikator capaian ini harus selaras dengan rencana pembangunan sebagaimana direncanakan dalam rancangan induk.
- A5.** Menetapkan kriteria status pasar dan mekanisme distribusi bantuan, sesuai dengan status pasar dan tujuan program di kabupaten yang sudah diidentifikasi. Sebagai contoh, jika tujuan program adalah mendongkrak produktivitas, mekanisme bantuan berbentuk hibah barang cocok digunakan untuk daerah dengan status pasar semikuat atau lemah (yang berpotensi untuk berkembang). Sementara itu, jika tujuannya adalah mengurangi biaya bagi petani, program bantuan benih sebaiknya menggunakan mekanisme hibah uang (contoh: penebusan langsung menggunakan *smart card* atau kartu tanda penduduk [KTP]) untuk menyasar petani berskala kecil di daerah dengan status pasar kuat.
- A6.** Menetapkan kriteria penerima bantuan yang jelas dengan mempertimbangkan riwayat pembelian dan penggunaan benih agar selaras dengan tujuan program.

⁵ Kecuali data produktivitas, yang perlu mencerminkan peningkatan target.

B. Pelaksanaan

Proses pengadaan

- B1.** Untuk bantuan berbentuk hibah barang, vendor yang berpartisipasi perlu diwajibkan untuk menyediakan pelatihan GAP kepada petani dan/atau petugas penyuluh di daerah yang menjadi sasaran.
- B2.** Memfinalisasi pengaturan hak kekayaan intelektual dan royalti untuk varietas benih sehubungan dengan perpindahan pemulia ke BRIN atau entitas lainnya. Hal ini perlu dilakukan agar perusahaan benih berlisensi dapat memperoleh benih sumber yang mereka butuhkan. Upaya ini juga akan membuka jalan bagi perusahaan nasional dengan orientasi pasar komersial untuk berpartisipasi dalam program bantuan sebagai titik awal dalam melakukan ekspansi pasar.

Proses penargetan (calon penerima calon lokasi [CPCL])

- B3.** Menentukan status pasar hingga tingkat desa. Hal ini dilakukan dengan mengacu kepada kabupaten-kabupaten yang teridentifikasi dalam rancangan induk.
- B4.** Pada tingkat kabupaten, dinas pertanian setempat harus menyelaraskan kriteria lokasi pada juknis/juklak bantuan benih, alat dan mesin, serta irigasi untuk mengoptimalkan dampak terhadap tujuan program.
- B5.** Memilih wilayah dan kelompok tani dengan mempertimbangkan mekanisme distribusi, status pasar, serta riwayat pembelian dan penggunaan benih penerimanya.

Pelaksanaan program

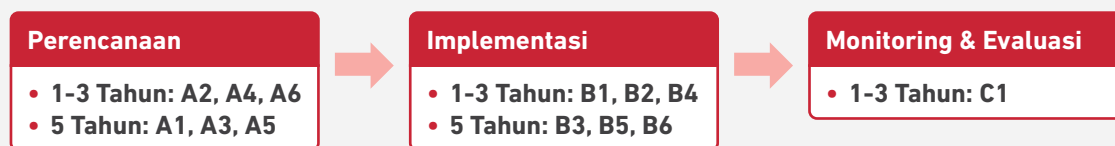
- B6.** Dinas pertanian kabupaten perlu memetakan topik dan jadwal kunjungan agronomis dari sektor swasta dan melakukan sinkronisasi dengan program penyuluhan pertanian pemerintah. Hal ini penting dalam penyaluran bantuan berbentuk hibah barang yang menargetkan adopsi varietas benih unggul dan GAP.

C. Pemantauan dan Evaluasi

- C1.** Melakukan pemantauan serta evaluasi atas kinerja program terhadap tujuan yang telah ditetapkan selama dan setelah program.

Melihat kesiapan teknis dan lembaga saat ini, rekomendasi-rekomendasi di atas dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori: rekomendasi yang dapat diimplementasikan segera (1–3 tahun) (*low-hanging fruits*) dan rekomendasi jangka menengah untuk diimplementasikan dalam 5 tahun (**Gambar 2**).

Gambar 2.
Rekomendasi Jangka Pendek dan Menengah untuk Mereformasi Program Bantuan Benih



Referensi

- Kato, T., & Greeley, M. (2016). Agricultural input subsidies in sub-Saharan Africa. *IDS Bulletin*, 47(2), 33-48. <https://bulletin.ids.ac.uk/index.php/idsbo/article/download/2716/html?inline=1>
- Kementerian Pertanian. (2023). Laporan 2023. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. <https://tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads/document/LAPORAN%20TAHUNAN%202023.pdf>
- BPS. (2023). Analysis of Maize and Soybean Yield in Indonesia, 2022: Result of Crop-Cutting Survey. *Badan Pusat Statistik Indonesia*.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep, 2024. Pedoman Implementasi Bantuan Benih Jagung Menggunakan Dataset Smart CPCL.
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2023. *Petunjuk Teknis Program Bantuan dan Subsidi Benih Jagung Dinas Pertanian dan Perkebunan yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah*.

TENTANG PENULIS

Aditya Alta adalah Kepala Peneliti Bidang Pertanian di CIPS. Ia mempunyai latar belakang metodologi riset kualitatif dan interpretif. Ia menerima gelar Magister dari Erasmus University Rotterdam di bidang Pemerintahan dan Kebijakan Pembangunan. Sebelum bergabung dengan CIPS, Aditya telah melakukan berbagai riset di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB Universitas Indonesia, serta sebagai konsultan untuk proyek-proyek pembangunan.

Azizah Fauzi lulus dengan gelar Master of Arts dalam Ekonomi Politik Internasional dari University of Manchester dan Bachelor of Arts dalam Hubungan Internasional dari University of Nottingham. Azizah memiliki minat penelitian pada isu-isu pembangunan pedesaan dan ekonomi politik migrasi internasional. Ia telah menyelesaikan CIPS Emerging Policy Leaders Program (EPLP) pada tahun 2021 dan kemudian bergabung dengan tim peneliti bidang pertanian di CIPS.

Binar Asri Lestari meraih gelar Master of Public Policy dari Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik Indonesia serta gelar psikologi dari Universitas Indonesia. Ia pernah bekerja di UNDP Indonesia dan membantu mendirikan Think Policy Indonesia serta mengembangkan the Indonesian Heritage Agency. Minatnya meliputi inklusivitas gender, teknologi, budaya, dan partisipasi pemuda.

Biyana Shandy Paramayudha meraih Master Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan dari Universitas Indonesia, serta gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Surabaya/Indonesia. Sebelum bergabung dengan CIPS, Biyana berkontribusi dalam penelitian di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia dan ITS Surabaya.

Deasy Pane adalah seorang Peneliti Mitra di CIPS. Dia sudah bekerja selama lebih dari satu dekade di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Selama masa kariernya, beliau fokus pada perencanaan di bidang isu-isu ekonomi terutama kebijakan perdagangan. Penelitiannya berfokus pada area ekonomi pembangunan, perdagangan internasional, industri, dan kebijakan publik. Dr. Deasy Pane menerima gelar PhD dibidang ekonomi dari Australian National University dan mempunyai gelar insinyur dari Institut Teknologi Bandung.

Hasran adalah seorang Peneliti di Center for Indonesian Policy Studies. Sebelum bergabung dengan CIPS. Ia pernah bekerja sebagai Asisten Peneliti Integrasi Ekonomi Domestik di Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) dan Konsultan Riset untuk Atase Perdagangan KBRI Canberra/Australia.

Maria Dominika meraih gelar sarjana Ilmu Politik dari Universitas Padjadjaran Bandung, yang diselesaikannya dengan beasiswa dari Bank Indonesia. Monik pertama kali bergabung dengan CIPS melalui Emerging Policy Leaders Program tahun 2023, yang kemudian direkrut sebagai asisten peneliti.

Shabrina Tjandra pernah bekerja sebagai Project Management Officer and Agriculture Commodity Trading Analyst di industri pangan dan unggas, dengan fokus pada analisis penawaran dan permintaan produk biji-bijian (jagung, gandum, dan bubuk kedelai). Ia meraih gelar sarjana di bidang biobisnis dari Indonesia International Institute of Life Sciences dan memiliki ketertarikan terhadap ketahanan pangan dan pengembangan pertanian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Studi ini terlaksana dengan dukungan dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia (DFAT) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melalui program Kemitraan Australia-Indonesia Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture (PRISMA).

Kerja kami bergantung pada dukungan Anda.
Kunjungi www.cips-indonesia.org/donate untuk mendukung CIPS.



Lihat ringkasan kebijakan lain yang diterbitkan Center for Indonesian Policy Studies



Meningkatkan Partisipasi
Petani dalam Sistem Resi
Gudang



Dari Larangan hingga
Percepatan Ekspor: Mengapa
Intervensi Harga Minyak
Goreng Tidak Efektif



Produktivitas Kelapa Sawit
Tetap Terbatas Seiring
Melonjaknya Harga Minyak
Goreng di Indonesia



Meningkatkan Inklusi dalam
Indeks Literasi Digital Nasional:
Dari Pengukuran hingga
Pemberdayaan



Mendirikan Perguruan Tinggi
Luar Negeri di Indonesia



Meningkatkan Kesiapan Kerja
Lulusan SMK melalui Perbaikan
Kurikulum Bahasa Inggris



Persepsi Orang Tua terhadap
Pembelajaran Tatap Muka



Memajukan Keterampilan
Literasi Digital Siswa Melalui
Pemutakhiran Kurikulum
Sekolah



Mengkaji Hambatan
Pembelajaran Jarak Jauh di
Indonesia di Masa Pandemi
Covid-19

Silahkan kunjungi situs kami untuk membaca publikasi lainnya:

www.cips-indonesia.org/publications



CIPS

Center for Indonesian
Policy Studies

TENTANG THE CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non profit yang bertujuan untuk menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat kebijakan yang ada di dalam lembaga pemerintah eksekutif dan legislatif.

CIPS mendorong reformasi sosial ekonomi berdasarkan kepercayaan bahwa hanya keterbukaan sipil, politik, dan ekonomi yang bisa membuat Indonesia menjadi sejahtera. Kami didukung secara finansial oleh para donatur dan filantropis yang menghargai independensi analisis kami.

FOKUS AREA CIPS:

Ketahanan Pangan dan Agrikultur: Memberikan akses terhadap konsumen di Indonesia yang berpenghasilan rendah terhadap bahan makanan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan berkualitas. CIPS mengadvokasi kebijakan yang menghapuskan hambatan bagi sektor swasta untuk beroperasi secara terbuka di sektor pangan dan pertanian.

Kebijakan Pendidikan: Masa depan SDM Indonesia perlu dipersiapkan dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan terhadap perkembangan abad ke-21. CIPS mengadvokasi kebijakan yang mendorong sifat kompetitif yang sehat di antara penyedia sarana pendidikan. Kompetisi akan mendorong penyedia sarana untuk terus berupaya berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan terhadap anak-anak dan orang tua yang mereka layani. Secara khusus, CIPS berfokus pada peningkatan keberlanjutan operasional dan keuangan sekolah swasta berbiaya rendah yang secara langsung melayani kalangan berpenghasilan rendah.

Kesempatan Ekonomi: CIPS mengadvokasi kebijakan yang bertujuan untuk memperluas kesempatan ekonomi dan peluang bagi pengusaha dan sektor bisnis di Indonesia, serta kebijakan yang membuka peluang lebih luas bagi masyarakat Indonesia berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pendapatan yang lebih layak dan menciptakan kesejahteraan ekonomi.

www.cips-indonesia.org

 facebook.com/cips.indonesia

 [@cips_id](https://twitter.com/cips_id)

 [@cips_id](https://instagram.com/cips_id)

 [Center for Indonesian Policy Studies](https://www.linkedin.com/company/center-for-indonesian-policy-studies)

 [CIPS Learning Hub](https://www.youtube.com/cipslearninghub)

Jalan Terogong Raya No. 6B
Cilandak, Jakarta Selatan 12430
Indonesia